
**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI, KOMPETENSI AKUNTANSI,
SUPERVISION, ACCOUNTABILITY, DAN TRANSPARENCY TERHADAP
POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA
(STUDI EMPIRIS PADA SEJUMLAH DESA DI KABUPATEN
PURWOREJO)**

Nada Irma Farida, Nanang Agus Suyono, Susanti
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: nadairmafarida1312@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision, accountability, dan transparency terhadap potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat dan staff balai desa di Kabupaten Purworejo yang berjumlah 5.132 orang. Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision, dan transparency berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa, sedangkan accountability tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

Kata Kunci : Sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, supervision, accountability, transparency, dan potensi penyalahgunaan dana desa

ABSTRACT

This research has purpose to analyze the effect of the accounting system, accounting competence, supervision, accountability, and transparency on the potential for misuse of village funds in Purworejo Regency. This type of research is quantitative. The population in this research were the apparatus and staff of the village hall in Purworejo Regency, amounting to 5.132 people. The sample collection method in this research is using random sampling. The analysis technique used is multiple linear analysis. The results of this research indicate that the accounting system, accounting competence, supervision, and transparency have a negative effect on the potential for misuse of village funds, while accountability has no effect on the potential for misuse of village funds.

Keywords Accounting system, accounting competence, supervision, accountability, transparency, and potential misuse of village funds.

1. PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut Brodjonegoro (2014) desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi, 2015 dalam Husnurrrosyidah dan Suendro, 2018).

Menurut BPKP (2015) dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substansif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini terjadi karena pemerintah desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Menurut Detik News (2017) menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di sela "Seminar Regional Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa (Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa)" di Gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur Jateng pada 3 Oktober 2017 menyampaikan, bahwa dana desa masih rawan disalahgunakan di sejumlah desa. Setidaknya ada 11 kasus penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum

di Jateng pada saat itu, salah satunya adalah di Kabupaten Purworejo. Ganjar Pranowo menyebutkan, saat di Purworejo, ada laporan penyalahgunaan dana desa di 14 Desa di Purworejo. Hal itu sesuai investigasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo yang disampaikan pada sosialisasi TP4 D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) terdapat pengaduan di 14 desa, bentuk penyalahgunaannya antara lain kegiatan fiktif, *mark up* harga misal harga dimahalkan, *mark up* jumlah misal membeli barang 5 mengaku 8 dalam laporannya, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan. Beberapa variabel yang mempengaruhi potensi penyalahgunaan dana desa adalah sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, *supervision*, *accountability*, dan *transparency*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Y)

Dikaji dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan ADD merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada rumusan dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut, dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa tindakan Kepala Desa yang menyalahgunakan ADD untuk kepentingan pribadi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Sistem Akuntansi (X1)

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016).

Kompetensi Akuntansi (X2)

Kompetensi akuntansi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005).

Supervision (X3)

Supervision didefinisikan sebagai proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang

sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Hasibuan, 2002).

Accountability (X4)

Accountability berdasarkan dalam kajian Administrasi Negara mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (Ellectrananda dan Wibisono, 2018).

Transparency (X5)

Transparency adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Agus, 2006).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pengaruh Sistem Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Ketika desa yang memiliki sistem akuntansi yang terkomputerisasi dapat memudahkan pelaporan keuangan dana desa. Dengan demikian, sistem akuntansi yang baik di dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana desa akan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Sistem Akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Aparatur desa yang memiliki kompetensi akuntansi mengandung arti penguasaan kemampuan dan aktivitas mengikuti prosedur akuntansi yang benar sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan berkualitas sehingga menghindarkan aparatur desa dari penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Kompetensi akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh Supervision Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya

ditempuh langkah pengendalian dan *supervision* untuk meminimalisir potensi tersebut. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: *Supervision* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh Accountability Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Accountability menuntut Kepala Desa secara jabatannya mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya *accountability* tersebut diharapkan bisa meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

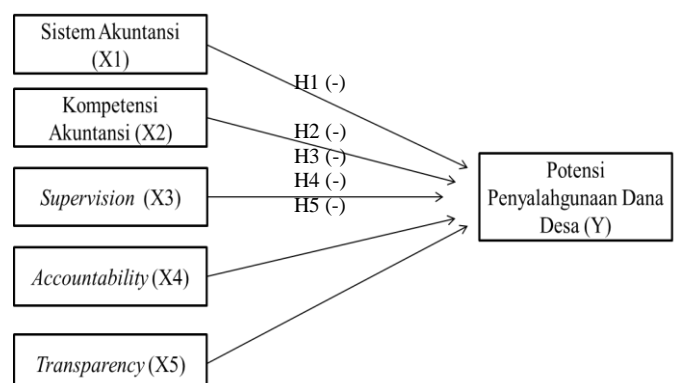
H4: *Accountability* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh Transparency Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan dana desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin adanya *transparency* dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak tersebut perlu dibangun. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: *Transparency* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dibuat model penelitian sebagai berikut:



3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012)

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat dan staff balai desa di Kabupaten Purworejo yaitu berjumlah 5.132 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *random sampling*. Menurut Sugiyono (2001) teknik sampel *random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan *Rumus Slovin*, Dengan N (populasi) sebesar 5.132 maka jumlah n (sampel) yang digunakan adalah sebesar 98 responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat di lapangan (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini perangkat desa dan staff yang aktif bekerja di Balai Desa yang mewakili masing-masing desa di Kabupaten Purworejo.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Setiap indikator pernyataan dari kuesioner menggunakan skala *likert*. Skala ini banyak digunakan untuk memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan

dalam bentuk persetujuan terhadap suatu pernyataan (Bilson, 2005).

DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Y)

Penelitian Yulianah (2015) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana dari pemerintah daerah yang langsung masuk pada rekening desa, dimana dalam penggunaannya merupakan kewenangan penuh dari Kepala Desa. Dengan demikian, akan sangat rentan terhadap penyalahgunaan karena dalam perencanaan kegiatanpun merupakan kewenangan Kepala Desa, sementara masyarakat yang dalam memberikan masukan Kepala Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Adapun indikator potensi penyalahgunaan dana desa yaitu: regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan sumber daya manusia. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan dengan 5 skala likert.

Sistem Akuntansi (X1)

Menurut Sudana (2007) sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem aplikasi terkomputerisasi yang mampu melakukan pengolahan data transaksi keuangan perusahaan secara terintegrasi. Adapun indikator sistem akuntansi yaitu: tingkat akurasi, ketepatan, kecepatan, dan kemudahan. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan dengan 5 skala likert.

Kompetensi Akuntansi (X2)

Kompetensi akuntansi merupakan ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005). Adapun indikator kompetensi akuntansi yaitu: keterampilan, pengetahuan, kemampuan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 7 pernyataan dengan 5 skala likert.

Supervision (X3)

Supervision didefinisikan sebagai proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Hasibuan, 2002). Adapun indikator *supervision* yaitu: pengamatan, permintaan keterangan, dan

perwakilan wilayah. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 3 pernyataan dengan 5 skala likert.

Accountability (X4)

Accountability dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Damayanti (2018) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Adapun indikator *accountability* yaitu: kemampuan pemerintah, pemberian informasi, dan laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 3 pernyataan dengan 5 skala likert.

Transparency (X5)

Menurut Agus Dwiyanto (2006) *transparency* adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Adapun indikator *transparency* yaitu: keterbukaan pemerintah desa, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang terdiri dari 5 pernyataan dengan 5 skala likert.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35.370	1.510		23.423	.000
Sistem_Akuntansi	-.219	.101	-.177	-2.175	.032
Kompetensi_Akuntansi	-.284	.070	-.266	-4.076	.000
Supervision	-.633	.172	-.340	-3.679	.000
Accountability	.308	.161	.181	1.920	.058
Transparency	-.436	.112	-.380	-3.879	.000

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 35,370 - 0,219 SA - 0,284 KA - 0,633 SP + 0,308 AC - 0,436 TP + 1,102$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 35,370 menunjukkan bahwa jika variabel

independen yaitu sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, *supervision*, *accountability*, dan *transparency* bernilai konstan, maka perangkat desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-rata memiliki potensi dalam penyalahgunaan dana desa sebesar 35,370%.

2. Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh sistem akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien $-0,219$ dan signifikan pada $0,032$. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima. Artinya semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa, sehingga setiap penambahan poin pada kualitas sistem akuntansi komputerisasi akan menurunkan tingkat potensi penyalahgunaan dana desa sebesar $21,9\%$.
3. Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh kompetensi akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien $-0,284$ dan signifikan pada $0,000$. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa kompetensi akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima. Artinya semakin kompeten perangkat desa yang bekerja maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa, sehingga setiap penambahan poin pada kompetensi akuntansi akan menurunkan tingkat potensi penyalahgunaan dana desa sebesar $28,4\%$.
4. Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh *supervision* terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien $-0,633$ dan signifikan pada $0,000$. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa *supervision* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima. Artinya semakin baik *supervision* yang dilaksanakan maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa,

sehingga setiap penambahan poin dalam pelaksanaan *supervision* akan menurunkan tingkat potensi penyalahgunaan dana desa sebesar 63,3%.

5. Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh *accountability* terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien 0,308 dan signifikan pada 0,058. Karena memiliki tingkat signifikan lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa *accountability* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa ditolak. Artinya *accountability* yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak mempengaruhi naik turunnya potensi penyalahgunaan dana desa karena hanya bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan anggaran serta perangkat juga tidak mempedulikan sesuai dan tidak sesuai laporan pertanggungjawaban dengan praktek lapangannya.
6. Berdasarkan tabel 4.13 untuk pengaruh *transparency* terhadap potensi penyalahgunaan dana desa memiliki koefisien -0,436 dan signifikan pada 0,000. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan bahwa *transparency* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa diterima. Artinya semakin bebas dan luasnya penerapan *transparency* maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa, sehingga setiap penambahan poin pada *transparency* akan menurunkan tingkat potensi penyalahgunaan dana desa sebesar 43,6%.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.752	.739	1.102

Berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,739 atau 73,9%, hal ini menunjukkan bahwa variabel potensi penyalahgunaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, *supervision*,

accountability, *transparency* sebesar 73,9%, sedangkan sisanya sebesar 26,1% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa bahwa sistem akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa atau H1 diterima. Artinya bahwa sistem akuntansi di desa Kabupaten Purworejo sudah baik dikarenakan pemrosesan akuntansi yang dilakukan sudah secara komputerisasi, seperti pengelolaan dana desa dimulai dari pembuatan jurnal, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta membuat laporan keuangan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa bahwa kompetensi akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa atau H2 diterima. Artinya bahwa aparatur desa kabupaten Purworejo sudah kompeten dalam bidang akuntansi, seperti memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan dana desa yang telah menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi SISKEUDES, perangkat mampu bekerjasama dengan rekan kerja, dan tolong menolong dalam bekerja, serta bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Semakin kompeten perangkat desa yang bekerja maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh *Supervision* Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa bahwa *supervision* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa atau H3 diterima. Artinya bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Purworejo telah

melakukan pengawasan dengan baik seperti adanya pengendalian dan pengawasan dana oleh pemerintah desa dan masyarakat secara optimal serta dari inspektorat kurang lebih setiap 2 tahun sekali dan adanya permintaan keterangan oleh pengawas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan aliran penggunaan dana desa. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa.

Pengaruh *Accountability* Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa bahwa *accountability* tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa atau H4 ditolak. Artinya *accountability* dilakukan atau tidak tetapi faktor lain seperti sistem akuntansi, kompetensi akuntansi, *supervision*, dan *transparency* tidak dilakukan maka akan terjadi potensi penyalahgunaan dana desa dan jika *accountability* dilakukan atau tidak sedang faktor lain diterapkan maka akan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa karena hanya bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan anggaran serta perangkat juga tidak mempedulikan sesuai dan tidak sesuai laporan pertanggungjawaban dengan praktek lapangannya, selain itu rata-rata pendidikan terakhir perangkat desa adalah SMA sehingga pengetahuan dalam pembuatan dan bagaimana isi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan belum dikuasai dengan sedalam-dalamnya.

Pengaruh *Transparency* Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa bahwa *transparency* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa atau H5 diterima. Artinya bahwa pemerintah desa Kabupaten Purworejo mengelola keuangan secara terbuka atau *transparency* seperti laporan akuntabilitas kinerja instansi dipublikasikan secara bebas dan dapat diakses oleh masyarakat luas yaitu dengan memasang papan atau banner perhitungan anggaran dana desa di depan balai desa, informasi yang tersedia dapat dimengerti oleh semua kalangan, dan dilaksanakannya pertanggungjawaban instansi secara periodik.

Semakin bebas dan luasnya penerapan *transparency* maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H₁ diterima). Artinya Sistem akuntansi yang baik ditandai dengan pemrosesan akuntansi dilakukan secara komputerisasi dan menggunakan sistem akuntansi, informasi yang dihasilkan sangat akurat, tepat sasaran, tepat guna, dan memudahkan pengguna sistem akuntansi dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.
2. Kompetensi akuntansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H₂ diterima). Artinya aparatur yang memiliki kompetensi akuntansi yaitu yang memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas dalam bidang akuntansi, mempunyai pengetahuan dalam bidang akuntansi, mampu bekerjasama dengan baik, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan tanpa kesalahan, dan menerima gaji sesuai hasil kerjanya maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga baik sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.
3. *Supervision* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H₃ diterima). Artinya *supervision* yang optimal yaitu pengamatan yang menjamin pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adanya permintaan keterangan oleh pengawas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan aliran penggunaan dana desa, dan adanya perwakilan pengawas dari pemerintah, pendamping desa, masyarakat sekitar sehingga potensi penyalahgunaan dana desa akan terminimalisir.
4. *Accountability* tidak berpengaruh terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H₄ ditolak). Artinya *accountability* yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak

mempengaruhi naik turunnya potensi penyalahgunaan dana desa. Hal ini disebabkan karena *accountability* yang dijalankan belum sesuai dengan kriteria yang seharusnya dipenuhi, dimungkinkan karena rata-rata pendidikan terakhir perangkat desa adalah SMA sehingga pengetahuan dalam pembuatan dan bagaimana isi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan belum dikuasai dengan sedalam-dalamnya.

5. *Transparency* berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa (H_5 diterima). Artinya *transparency* yang baik yaitu ketika laporan akuntabilitas kinerja instansi dipublikasikan secara bebas dan dapat diakses oleh masyarakat luas, informasi yang tersedia dapat dimengerti oleh semua kalangan, dan dilaksanakannya pertanggungjawaban instansi secara periodik melalui sehingga dapat mencegah semakin maraknya penyalahgunaan dana desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk lebih meningkatkan kualitas sistem akuntansi dan kompetensi akuntansi serta lebih menekankan *supervision*, *accountability*, dan *transparency* dalam rangka meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Purworejo.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa, agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan mengambil objek penelitian atau variabel baru, selain yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya.
3. Untuk penelitian-penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas yang belum digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi potensi penyalahgunaan dana desa, misalnya: regulasi, kelembagaan, dan tata laksana.

6. DAFTAR PUSTAKA

Atik, R., B. E. Purnama, dan Sukadi. 2008. *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Ngadirajen*. Jurnal Speed.

Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Palembang: BPKP.

Basri, C. 2014. *Desa Belum Siap Kelola Dana Desa Yang Besar*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bilson, Simamora. 2005. *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Brodjonegoro, B. P. S. 2014. *Desa Belum Siap Kelola Dana Desa yang Besar*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Damayanti, Wienda. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ellectrananda Anugerah Ash Shidiqq dan Hindrawan Wibisono. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

Fitri, Sukmawati dan Alfi Nurfitriani. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM.

Gibson. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Jaya Abadi.

Gustiawan. 2013. *Pengelolaan Data Kependudukan: Menghasilkan Laporan Data Penduduk, Masuk, Meninggal, Lahir, Pindah, dan Laporan Umur*.

Hanifah, Lia. Wawo, Andi Basru. Husin. 2016. *Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Universitas Halu Oleo Kendari.

Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Helmy, Ella. 2012. *Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Universitas Diponegoro.

- Hoesada, J. 2014. *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
<http://repository.unika.ac.id/17354/8/13.60.0225%20DEVI%20SIWI%20ISWANTI%20%284.83%29.LAMP.pdf>
<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3668489/11-kasus-penyalahgunaan-dana-desadi-jateng-diproses-hukum>
<https://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/populasi-dan-sampel/>
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. FH UII Press.
- Husnurosyidah & Suendro, G. 2018. *Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa*. Jurnal Aktsar. Universitas Semarang dan IAIN Kudus.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Ismail, Muhammad. Widagdo, Ari Kuncara. Widodo, Agus. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelola Dana Desa*. Jurnal Universitas Sebelas Maret.
- Julita, Eva dan Syukriy Abdullah. 2020. *Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.
- Madril, O. 2018. Obral Remisi untuk Koruptor. <http://digilib.um.ac.id>.
- Maratul Makhmudah. 2016. *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang". Yustisia 95.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marten, Bunga. Aswari, Aan. Djanggih, Hardianto. 2018. *Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi*. Jurnal Holrev.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Maret.
- Papuas, Alfrianus. 2012. *Rancang Bangun Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe*. Jurnal Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- PP No. 60 Tahun 2014.
- Priyatun, Iis. 2018. *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Universitas Lampung.
- Ratih dan Asri. 2012. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Sagita, Reflay Ade dan Widayanti. 2017. *Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. UNISSULA Semarang.
- Sakthi HR, Hairil. 2017. *Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Samplungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Jurnal Universitas Hasanuddin.
- Sholeh, Moh. 2017. *Pengaruh Kompetensi Akuntansi Pegawai dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Edisi revisi. Jakarta.
- Sri Mulyani. *Penjelasan Tentang Transfer Daerah dan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Informasi APBN 2018*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sudana, A.A.K.O. 2007. *Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Layanan Jasaboga Pesawat Udara*. Jurnal Teknologi Elektro.

- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukmalalana dkk. 2017. *Akuntabilitas & Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Susilo, Joko Hadi. 2019. *Alokasi Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: Inteligensia Media.
- Umi Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Manjar Maju.
- Yulianah, Yuyun. 2015. *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Jurnal Universitas Suryakencana.